

KEPALA DESA WONOKERTO

KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA WONOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes) DESA WONOKERTO

TAHUN 2020 – 2026

KEPALA DESA WONOKERTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 33); 18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42); 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERTO

dan

KEPALA DESA WONOKERTO

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA WONOKERTO TAHUN 2021 – 2026. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wonokerto
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonokerto
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonokerto
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonokerto
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

**BAB II**

**PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA**

**PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOKERTO**

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

* Latar Belakang
* Landasan Hukum
* Tujuan

1. Bab II Profil Desa

* Sejarah Desa
* Kondisi Umum Desa
* SOTK Desa

1. Bab III Proses Penyusunan RPJMDes
2. Bab IV Prioritas Masalah
3. Bab V Kebijakan Desa

* Visi dan Misi
* Arah Kebijakan Pembangunan Desa
* Arah Kebijakan Keuangan Desa
* Program dan Kegiatan Indikatif

1. Bab VI Penutup
2. Lampiran – lampiran

* Matrik Program Kegiatan
* Proses Penyusunan Program
* Berita Acara Musyawarah
* Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
* Notulen Musyawarah
* Peta Desa
* Foto – foto Kegiatan

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonokerto.

Ditetapkan di Wonokerto

pada tanggal 6 April 2020

Kepala Desa Wonokerto

H. T U P I N

NIP.19750301 200906 1 001

Diundangkan di Wonokerto

pada tanggal 6 April 2020

Sekretaris Desa Wonokerto

MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE

LEMBARAN DESA WONOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2020

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah Desa Wonokerto Periode 2020-2026 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Wonokerto Tahun 2019 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/451/427.12/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2020-2026 Tanggal 31 Desember 2019.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, disetiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanan pembangunan desa yang telah bertahun – tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

1. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
2. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
3. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
4. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
5. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
6. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

* 1. **Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40).
    1. **Maksud dan Tujuan**
       1. **Maksud**
22. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Wonokerto;
23. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Wonokerto serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
24. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
25. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Wonokerto terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.
    * 1. **Tujuan**
26. Tersedianya dokumen RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021-2026 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
27. RPJMDes sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

**BAB II**

**PROFIL DESA**

* 1. **Sejarah Desa**

Desa Wonokerto berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Wonokerto, bahwa konon nama Wonokerto berasal dari abad ke-15 sejak kerajaan Minak Koncar dari Lamajang melarikan diri beserta pengikutnya dari kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangna, mereka melewati hutan belantara. Desa Wonokerto berasal dari kata bahasa jawa WONO KERTO. Wono artinya hutan. Dahulu asal mula berdirinya Desa Wonokerto terbentuk pada masa Kerajaan Minak Koncar tetapi pada masa itu masih belum ada Kepala Desa, barulah pada jaman Penjajahan Jepang terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Wonokerto di bagi menjadi 4 Dukuhan yaitu : WONOASIH, WONOSARI, WONOAYU dan WONOREJO.

Para Pejabat Kepala Desa Wonokerto semenjak berdirinya Desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Daftar Nama Kepala Desa Wonokerto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **N A M A** | **MASA JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | SOEMAR | 1916 – 1939 | Petinggi |
| 2 | RATEMON | 1939 – 1963 | Petinggi |
| 3 | KERTO JATI / TOLAR | 1964 – 1989 | Petinggi |
| 4 | H. SADINO MUKTI | 1989 – 1997 | Kepala Desa |
| 5 | SAMPURNO | 1997 – 2006 | Kepala Desa |
| 6 | H. SADINO MUKTI | 2006 – 2013 | Kepala Desa |
| 7 | Hj. IMMA SAROH | 2013 s/d 2019 | Kepala Desa |
| 8 | H. TUPIN | 2020 s/d 2026 | Kepala Desa |

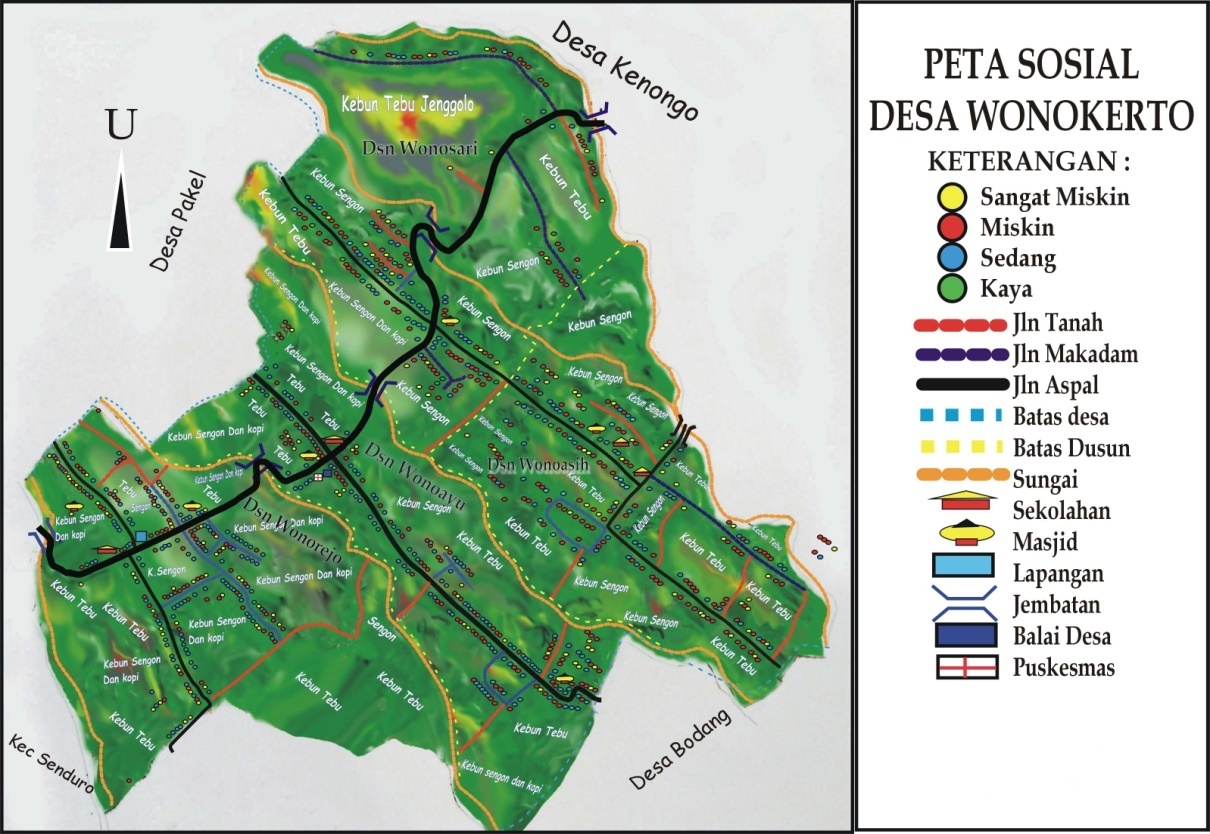
* 1. **Kondisi Umum Desa**
     1. **Aspek Geografi**

Desa Wonokerto merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Gucialit dan termasuk daerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 29 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 4-8 mm/tahun, Luas desa + : 551,51 hektar dengan batas sebagaiberikut :

* Sebalah Utara : Desa Kenongo Kec. Gucialit
* Sebelah Timur : Desa Bodang Kec. Padang
* Sebelah Selatan : Desa Bedayu Kec. Senduro
* Sebalah Barat : Desa Pakel Kec. Gucialit

Posisi letak Desa Wonokerto berada di dataran tinggi atau pegunungan dengan jarak ke Kecamatan sekitar 3 Km dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 17 Km.

Gambar Peta Desa Wonokerto



* + 1. **Aspek Demografi**

Jumlah penduduk Desa Wonokerto sebanyak 3.385 jiwa yang tersebar di 4 Dusun, 8 RW dan 21 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.723 jiwa dan perempuan 1.659 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 4%, dengan tingkat kepadatan sebesar 700 jiwa/km2. Perkembangan jumlah penduduk di Desa Wonokerto dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perkembangan Kependudukan

Tahun 2014 – 2019

Jumlah Penduduk Tahun 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 446 | 456 | 902 |
| WONOSARI | 187 | 323 | 349 | 672 |
| WONOAYU | 242 | 400 | 457 | 857 |
| WONOREJO | 262 | 512 | 499 | 1.011 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.681** | **1.761** | **3.442** |

Jumlah Penduduk Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 446 | 456 | 902 |
| WONOSARI | 187 | 323 | 349 | 672 |
| WONOAYU | 242 | 400 | 457 | 857 |
| WONOREJO | 262 | 512 | 499 | 1.011 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.681** | **1.761** | **3.442** |

Jumlah Penduduk Tahun 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 446 | 455 | 901 |
| WONOSARI | 187 | 325 | 351 | 676 |
| WONOAYU | 242 | 404 | 457 | 861 |
| WONOREJO | 262 | 516 | 498 | 1.014 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.691** | **1.761** | **3.452** |

Jumlah Penduduk Tahun 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 445 | 426 | 871 |
| WONOSARI | 187 | 324 | 347 | 671 |
| WONOAYU | 242 | 398 | 459 | 857 |
| WONOREJO | 262 | 530 | 512 | 1.042 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.697** | **1.744** | **3.441** |

Jumlah Penduduk Tahun 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 448 | 428 | 876 |
| WONOSARI | 187 | 327 | 340 | 667 |
| WONOAYU | 242 | 394 | 460 | 854 |
| WONOREJO | 262 | 541 | 421 | 962 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.710** | **1.646** | **3.359** |

Jumlah Penduduk Tahun 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DUSUN** | **Jumlah KK** | **Jumlah Jiwa**  **( L )** | **Jumlah Jiwa**  **(P)** | **JUMLAH** |
| WONOASIH | 267 | 452 | 429 | 881 |
| WONOSARI | 187 | 333 | 345 | 678 |
| WONOAYU | 242 | 397 | 460 | 857 |
| WONOREJO | 262 | 544 | 425 | 969 |
| **JUMLAH** | **958** | **1.726** | **1.659** | **3.385** |

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di Desa Wonokerto. Jika dilihat dari perkembangan jumlah KB aktif di Desa Wonokerto pada tahun 2013 – 2019 mengalami penurunan. Perkembangan jumlah peserta KB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS

Tahun 2015 - 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Satuan** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| PUS | Pasang | 917 | 876 | 441 | 525 | 547 |
| Peseta KB Aktif | Org | 762 | 657 | 317 | 377 | 388 |
| Prosentase | % | 83 | 75 | 72 | 71,8 | 70,9 |

Sumber : Pustu Desa Wonokerto

Data sebaran penduduk Desa Wonokerto yang mendiami wilayah dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

|  | Wilayah | Penduduk | | Jumlah | A-RTM | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lk. | Pr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dsn Wonoasih** | |  |  |  |  |  |
| **RW. 01** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 01 | 61 | 35 | 136 |  |  |
| 2. | RT. 02 | 44 | 51 | 95 |  |  |
| 3. | RT. 03 | 95 | 112 | 207 |  |  |
| **RW. 02** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 04 | 66 | 72 | 138 |  |  |
| 2. | RT. 05 | 69 | 61 | 130 |  |  |
| 2. | RT. 06 | 49 | 58 | 107 |  |  |
| 2. | RT. 07 | 21 | 23 | 44 |  |  |
| **Dsn Wonosari** | |  |  |  |  |  |
| **RW. 03** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 01 | 65 | 72 | 137 |  |  |
| 2. | RT. 02 | 88 | 96 | 184 |  |  |
| **RW. 04** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 03 | 65 | 69 | 134 |  |  |
| 2. | RT. 04 | 66 | 63 | 129 |  |  |
| **Dsn Wonoayu** | |  |  |  |  |  |
| **RW. 05** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 01 | 69 | 70 | 139 |  |  |
| 2. | RT. 02 | 73 | 73 | 146 |  |  |
| **RW. 06** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT. 03 | 84 | 93 | 177 |  |  |
| 2. | RT. 04 | 70 | 72 | 142 |  |  |
| 2. | RT. 05 | 84 | 92 | 180 |  |  |
| **Dsn Wonorejo** | |  |  |  |  |  |
| **RW 07** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT 01 | 110 | 130 | 240 |  |  |
| 2. | RT 02 | 87 | 110 | 197 |  |  |
| **RW 08** | |  |  |  |  |  |
| 1. | RT 03 | 97 | 113 | 210 |  |  |
| 2. | RT 04 | 64 | 69 | 133 |  |  |
| 3. | RT 05 | 89 | 112 | 201 |  |  |

* + 1. **Aspek Sumber Daya Alam**

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Wonokerto, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Wonokerto

| **No.** | **Uraian Sumber Daya Alam** | **Volume** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
| 1 | Tebu | 193 | Ha |
| 2 | Pulawija | 22 | Ha |
| 3 | Durian | 3,2 | Ha |
| 4 | Manggis | 3,5 | Ha |
| 5 | Alpukat | 1,4 | Ha |
| 6 | Mangga | 5 | Ha |
| 7 | Rambutan | 10,5 | Ha |
| 8 | Pisang | 17,3 | Ha |

* + 1. **Aspek Sumber Daya Manusia**

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumberdaya manusia di Desa Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Wonokerto

| **No.** | **Uraian Sumber Daya Manusia** | **Volume** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1980 | Orang |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 696 | Orang |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 355 | Orang |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 244 | Orang |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 86 | Orang |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | Orang |
| 7 | DIPLOMA I / II | 3 | Orang |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | Orang |
| 9 | STRATA II | 1 | Orang |
|  |  |  |  |

* + 1. **Aspek Sumber Daya Pembangunan**

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Wonokerto

| **No.** | **Uraian Sumber Daya Pembangunan** | **Volume** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
| 1 | Tenaga Kerja (Gotong Royong) | 1 | Kali/bulan |
| 2 | Sumber Daya Manusia | 3.385 | Jiwa |
|  |  |  |  |

* + 1. **Aspek Sumber Daya Sosial Budaya**

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Wonokerto

| **No.** | **Uraian Sumber Daya Sosial Budaya** | **Volume** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
| 1. | Sedekah Desa | 1 | Kali/Tahun |
| 2. | Mulutan | 1 | Kali/Tahun |
| 3. | Suroan | 1 | Kali/Tahun |
| 4. | Barik’an | 4 | Kali/Tahun |
| 5. | Kesenian Ojung | 1 | Kali/Tahun |
|  |  |  |  |

* 1. **Kondisi Pemerintahan Desa**
     1. **Wilayah Desa**

Wilayah Desa Wonokerto terdiri dari 4 Dusun, 8 RW dan 21 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8.

Data Wilayah Administrasi Desa Administrasi

|  | Wilayah | Nama Ketua | Ket |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 5 | 7 |
| **Dsn Wonoasih** | |  |  |
| **RW. 01** | | Ngatali |  |
| 1. | RT. 01 | Sunom |  |
| 2. | RT. 02 | Winarto |  |
| 3. | RT. 03 | Satuki |  |
| **RW. 02** | | Asmat |  |
| 1. | RT. 04 | Paidi |  |
| 2. | RT. 05 | Saput |  |
| 2. | RT. 06 | Nero |  |
| 2. | RT. 07 | P. Suprik |  |
| **Dsn Wonosari** | |  |  |
| **RW. 03** | | Siswono |  |
| 1. | RT. 01 | Tirto |  |
| 2. | RT. 02 | Sulikin |  |
| **RW. 04** | | Wagiyat |  |
| 1. | RT. 03 | Hinda |  |
| 2. | RT. 04 | Suprat |  |
| **Dsn Wonoayu** | |  |  |
| **RW. 05** | | Atmin |  |
| 1. | RT. 01 | Suwatah |  |
| 2. | RT. 02 | Sariono |  |
| **RW. 06** | | Lukman |  |
| 1. | RT. 03 | Seneli |  |
| 2. | RT. 04 | Suraji |  |
| 2. | RT. 05 | Buanar |  |
| **Dsn Wonorejo** | |  |  |
| **RW 07** | | Rianto |  |
| 1. | RT 01 | Soleh |  |
| 2. | RT 02 | Tohet |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RW 08** | | Sumosari |  |
| 1. | RT 03 | Supat |  |
| 2. | RT 04 | Wersat |  |
| 3. | RT 05 | Arnam |  |

* 1. **Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA WONOKERTO**

**KECAMATAN GUCIALIT** **KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DESA**

**H. TUPIN**

**SEKRETARIS DESA**

**MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE**

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

**ACH. SUWARNO A**

**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**

**BAWON ROSYID**

**KEPALA SEKSI PELAYANAN**

**SITI NURJANAH**

**KAUR TATA USAHA DAN UMUM**

**SINGGIH**

**KAUR PERENCANAAN**

**HERU PURNOMO**

**KAUR KEUANGAN**

**ABDUL ROHMAN**

**KASUN WONOASIH**

**RIYAN YUSUF A**

**KASUN WONOSARI**

**PARNO**

**KASUN WONOAYU**

**ABD GHOFUR**

**KASUN WONOREJO**

**MAHRUS ZAINI**

**BAB III**

**PROSES PENYUSUNAN RPJMDES**

* 1. **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes**

Pembentukan Tim Penysusun RPJMDes dilaksnakan dengan Proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang berjumlah 7 – 11 orang terdiri dari unsur : Perangkat Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dengan menyertakan keterwakilan kelompok perempuan minimal 30% dari jumlah tim penyusun dengan tujuan agar bisa mendapatkan tim penyusun RPJMDes yang legitimasi dan kompeten. Kegiatan pembentukan diawali dengan proses identifikasi calon tim penyusun RPJMDes, Proses pemilihan anggota tim sesuai dengan representasi dan kapasitas selanjutnya proses pembentukan tim penyusun yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJMDes.

Tim penyusun RPJMDes terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Ketua LPMD selaku Sekretaris
4. Anggota, yang berasal dari unsur :

• Perangkat Desa;

• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

• Unsur Masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun RPJMDes :

1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Pengkajian Keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Des; dan
4. Penyempurnaan rancangan RPJMDes.
   1. **PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Wonokerto, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

* + 1. **RPJM Nasional**

RPJM Nasional Tahun 2013 - 2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2013 - 2019 adalah **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**.

Untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
   * 1. **RPJM Provinsi**

RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMDes karena RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permassalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

* + 1. **RPJMD Kabupaten**

RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 memiiki visi ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT*** dan mempunyai misi :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan keagamaan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM, dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 6 (enam) agenda utama, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan, serta pengembangan dan pelestarian budaya;
2. Meningkatkan aksebilitas dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan, anak, dan pemuda;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
   * 1. **RT/RW Kabupaten**

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Wonokerto adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

* + 1. **RENSTRA SKPD**

Pada prinsipnya RENSTRA SKPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJMDes yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

* + 1. **Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonokerto**

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Tahun 2021-2026.

* 1. **PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan Pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan gambaran kondisi objektif desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan tahapan :

1. Penyelarasan Data Desa :

* Pengambilan data dari dokumen desa
* Pembandingan Data Desa dengan kondisi data saat ini.

1. Penggalian Gagasan Masyarakat :

* Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat desa, potensi / peluang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan – gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
* Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
* Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan kelompok;

1. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa :

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan.

* 1. **MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

Pembahasan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi-misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pendayagunaan potensi yang ada/dimiliki oleh desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara partisipatif melalui forum musyawarah desa.

Musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati : laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. yang dilakukan dengan diskusi Kelompok secara Terarah yang dibagi kedalam 4 Kelompok sesuai dengan bidang pembahasan.

* 1. **PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Proses penyusunan rancangan RPJMDes oleh tim penyusun RPJMDes sesuai dengan berita acara dan lampiran hasil musyawarah desa. tersusunnya rancangan RPJMDes dengan prioritas program / kegiatan berdasarkan 5 bidang yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak. Kemudian dilakukan cek ulang atas hasil Musyawarah Desa serta melakukan perbaikan teknis dan menyusun rancangan RPJM Desa sesuai dengan form yang telah ditentukan

* 1. **MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

Proses musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat guna Membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes.

* 1. **PENETAPAN RPJM DESA**

Rancangan RPJMDes yang telah disepakati melaluimusrenbang desa disahkan menjadi Peraturan Desa melalui Proses legalisasi RPJMDes sebagai dokumen perencanaan desa selama 6 (enam) tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

**BAB IV**

**PRIORITAS MASALAH**

* 1. **Masalah**

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musdes penyusunan RPJMDes Desa Wonokerto yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa, diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

**Tabel 4.1. : Bidang dan Permasalahan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Masalah** |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | * 1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : Tugu batas desa   2. Pendataan Desa; yaitu : Profil Desa   3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : Pembangunan Ruang Hijau Desa   4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes, Musdes RKPDes   5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Peta Sosial Desa   6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes, RKPDes dan APBDes   7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes dan LRA   8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras   9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pembangunan jalan, drainase, Pembangunan Gedung dan Plengsengan 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, Madrasah, TPQ 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : Tempat Wisata, BUMDes 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : Pembangunan Taman Desa , Ruang Terbuka Hijau Pelatihan Management BUMDes |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : Pembinaan RT / RW, LKMD, PKK, karang taruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : Satgas Keamanan Desa 3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : Yasinan, Tahlilan 4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; yaitu : Lapangan Terpadu 5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pembinaan Kelompok Kesenian |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Batik, Pelatihan Bengkel, Kopwan 2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Biogas 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bintek dan sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : Pelatihan Bengkel, Pelatihan Batik |

* 1. **Isu / Masalah Utama**

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

* 1. **Masalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat belum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan ITI, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
3. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawarata Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
4. Peran lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal.
5. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim
6. Tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah
7. Desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada.
8. Kwalitas produk-produk hukum desa masih belum memberikan arah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
9. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
10. Desa belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat *early worrning sistim* sehingga dalam mengantisipasi bencana sangat lemah
11. Belum mempunyai kegiatan yang mempunyai aspek kewilayahan dan kegiatan antar desa.
12. Tim pelestari dan pemelihara belum terlembaga dan belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.
13. Program –program lembaga yang ada di desa masih bersifat normatif sehingga implemtasinya belum merupakan kebutuhan masyarakat.

* 1. **Penyelenggaraan Pembangunan**

1. Prasarana dasar yang tersedia di desa baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastrutur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang
2. Pemeliharaan infrastrutur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal.
3. Pemanfatan sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat di manfatkan  dengan maksimal.
4. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untul lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya sehingga budaya lokal belum menonjol.
5. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengatahuan.
6. Desa belum mampu mempetakan pembangunan yang berbasis teknologi tepat guna.
7. Pembangunan sarana prasarana pendukung lembaga-lambaga keuangan desa belum maksimal untuk mendongkrak pendapatan desa.
8. Pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur belum diperkuat dengan dukungan dana.
9. Peran kelompok-kelompok di desa belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahtraan masyarakat.
10. Potensi unggulan dan potensi lokal belum dapat di bangkitkan kembali.

* 1. **Masalah dibidang Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Penyelesaian sengketa masyarakat diperlukan para legal sehingga kasus-kasus sengketa dapat diselesaikan di desa.
2. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah.
3. Rendahnya peran serta pasaraman oleh komponen masyarakat.
4. Potensi pariwisata cukup berpeluang dengan tofografi yang indah hal ini membutuhkan dukungan masyarakat.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sehingga masih sering terjadi banjir dan penyakit menular, lingkungan yang asri.
6. Mekanisme perencanaan dan anggaran yang transparan belum tersistem dengan baik.
7. Kegiatan-kegiatan yang terkait kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan hanya dilaksanakan sewaktu-waktu belum terlembaga dengan baik.
8. Untu menjaga kewibawaan pemerintah desa maka aparatur perlu disiplin, transparan dalam melaksanakan tugas.
9. Peran-peran lembaga sosial di desa masih sangat minim dalam kepeduliannya terhadap masyarakat miskin.

* 1. **Masalah dibidang Pemberdayaan kemasyarakatan**

1. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangun
2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi- lembaga-lembaga adat di desa.
3. Belum terakomodasinya beberapa kelompok yang bergerak di bidang ekonomi, sosial dan kesenian di desa oleh pemerintah desa.
4. Kelompok- kelompok belum mampu mandiri sehingga cendrung tergantung pada instansi dan pihak lain.
5. Kurang pedulinya masyarakat terhadap masyarakat miskin disekitarnya sehingga peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masih dominan.
6. Potensi seni dan budaya belum terlembaga dengan baik sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam membangun potensi khusus desa.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan aset desa sangat rendah dan belum terlembaga dengan baik.
8. Rendahnya kemampuan kelompok tani dalam penanganan paska panen.
9. Kemampuan BUMDes masih sangat terbatas.
10. Belum ada dukungan dalam pengembangan industri rumah tangga
11. Peran lembaga non formal di desa masih sangat rendah kontribusinya di dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong royong

Berdasarkan Rumusan permasalahan yang cukup besar yang didapat di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

* 1. **Masalah dan potensi dari potret desa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **MASALAH** | **POTENSI** |
| 1 | Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan | tenaga gotong royong |
| 2 | Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni | PKK  Kader-kader di desa  Pos Kesehatan Desa |
| 3 | Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk) | Pos Kesehatan Desa  Posyandu  Kader Posyandu |
| 4 | Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik | Pekarangan rumah  Kader Desa  Petani |
| 5 | Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolaan pasca panen | Lahan persawahan  Kelompok tani  Hasil panen |
| 6 | Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangan peternakan | Lahan  Peternak |
| 7 | Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk | Lahan tebu |
| 8 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK | Lokal  Guru Pengajar |

* 1. **Masalah dan potensi dari kalender musim**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah/Kegiatan/Keadaan** | **Pancaroba** | | | **Kemarau** | | | | **Musim Hujan** | | | | |
| **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Agt** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** |
| 1. | Musim tanam tebu |  |  |  |  | \*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |  |  |  |  |  |
| 2. | Musim kering / sulit air |  |  | \*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\* |  |  |  |  |
| 3. | Banyak orang kawin |  | \*\*\* | \*\*\*\* |  | \*\* | \*\*\* |  |  |  |  | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| 4. | Kesehatan (banyak penyakit) | \*\*\* | \*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\*\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **MASALAH** | **POTENSI** |
|  | Pada saat musim hujan terjadi banjir | * Saluran Air * Swadaya Masyarakat |
|  | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit | * Mantri * Bidana * Posyandu * Kader Posyandu |
|  | Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah) | * Pos kesehatan desa * Bidan desa * Kader PKK * Posyandu * Kader Posyandu |
|  | Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan | * Hasil panen |

* 1. **Masalah dan potensi dari kelembagaan desa**

**BAGAN KELEMBAGAAN DESA**

**MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **LEMBAGA** | **MASALAH** | **POTENSI** |
| 1 | PEMDES dan BPD | * Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Masih bingung untuk menafkahi keluarga * Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa | * Perangkat lengkap * Sarana tersedia * Ada usaha yang bisa dikembangkan |
| 2 | LKMD | * Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Masih bingung untuk menafkahi keluarga | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial |
| 3 | KELOMPOK TANI | * Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna * Sarana prasana menuju persawahan sangat minim | * Lembaga ada * Pengurus lengkap |
| 4 | SIMPAN PINJAM | * Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang * Kurangnya modal | * Modal usaha ada * Pengurus lengkap |
| 5 | KARANG TARUNA | * Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Sarana prasarana masih kurang maksimal | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial |
| 6 | PKK | * Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Sarana prasarana masih kurang maksimal | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial * Ada program kerja * Sarana tersedia |
| 7 | SEKOLAH/  TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL | * Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal * Sarana prasarana sekolah kurang memadai * Insentif tenaga pengajar masih rendah | * Tenaga Pengajar * Murid * Lahan pendidikan * Program kerja |
| 8 | POSKESDES | * Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana * Sarana prasarana kesehatan kurang memadai * Insentif kader masih rendah * Kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya | * Gedung poskesdes * Kader Posyandu * Program kerja * Posyandu |

**BAB V**

**KEBIJAKAN DESA**

* 1. **VISI dan MISI**
     1. **Visi**

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Wonokerto saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Wonokerto tahun 2021-2026, dicanangkan visi Pembangunan Desa Wonokerto adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA WONOKERTO YANG SEMAKIN MAJU, AMAN, TENTERAM, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

*Penjelasan Visi:*

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Maju, Aman, Tentram, Sejahtera dan Bermartabat artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Wonokerto yaitu masyarakat desa yang Sejahtera dan bermartabat, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya meweujudkan:

1. **Semakin Maju,** yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumder daya manusia yang semakin maju dan lebih baik;
2. **Aman,** yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi Masyarakat dan bebas anacaman apapun;
3. **Tentram,** yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia;
4. **Sejahtera,** yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
5. **Bermartabat,** yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa;
   * 1. **Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Wonokerto untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.
   * 1. **Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Wonokerto maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan pariwisata yang ada di desa Wonokerto kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional
   * 1. **Sasaran**

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Wonokerto dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan Desa Wonokerto sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;
   1. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan Pembangunan Desa Wonokerto akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapai perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Wonokerto yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Wonokerto tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

* 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

1. Penetapan dan penegasan batas Desa
2. Pendataan Desa
3. Penyusunan tata ruang Desa
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa
5. Pengelolaan informasi Desa
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
10. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
11. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
12. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    1. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
13. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
14. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
15. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
16. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
17. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
18. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
19. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
20. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
21. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
22. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
23. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
24. Air bersih berskala Desa
25. Sanitasi lingkungan
26. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
27. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
28. Sarana dan prasarana kesehatan
29. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
30. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
31. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
32. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
33. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
34. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
35. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
36. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
37. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
38. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
39. Penguatan permodalan BUM Desa
40. Pembibitan tanaman pangan
41. Penggilingan padi
42. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
43. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
44. Pembukaan lahan pertanian
45. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
46. Mesin pakan ternak
47. Pengembangan benih lokal
48. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
49. Pengembangan ternak secara kolektif
50. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
51. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
52. Penghijauan
53. Perlindungan terhadap satwa
54. Pengelolaan sampah secara terpadu
55. Perlindungan terhadap mata air
56. Pembersihan daerah aliran sungai
    1. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
57. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
58. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
59. Pembinaan kerukunan umat beragama
60. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
61. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
62. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
63. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
64. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
    1. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
65. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
66. Pelatihan teknologi tepat guna
67. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
68. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
69. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
70. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
71. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
72. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
73. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
74. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
75. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
76. Kelompok Perempuan
77. Kelompok Tani
78. Kelompok Masyarakat Miskin
79. Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
80. Kelompok perlindungan anak
81. Kelompok Pemuda
82. Kelompok Kesenian
83. Kelompok Keagamaan
84. Kelompok Simpan Pinjam
85. Kelompok Tenaga Pengajar
86. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
    1. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
    2. Penanggulangan Bencana
    3. Keadaan Darurat
    4. Keadaan Mendesak
    5. **Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2021 – 2026 didasarkan pada Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Anggaran serta Taat Azas APBDesa.

* + 1. Pengelolaan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Realisasi pendapatan Desa Wonokerto pada tahun anggaran 2013 s.d 2019 sebagaimana dalam tabel berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Desa TA 2013 – TA 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendapatan  Desa | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Pendapatan Asli Desa | 84.000 | 84.000 | 94.500 | 94.500 | 94.5000 | 94.500 |
| Alokasi Dana Desa | 147.070 | 147.070 | 312.536 | 312.536 | 351.837 | 351.837 |
| Dana Desa | 0 | 0 | 248.537 | 248.537 | 646.915 | 646.915 |
| Bagi Hasil Pajak |  |  | 1.545 | 1.545 | 12.650 | 12.650 |
| Bantuan Keuangan Khusus | 352.185 | 352.185 | 238.200 | 238.200 | 130.000 | 130.000 |

*(Dalam Ribuan 000)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendapatan  Desa | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Pendapatan Asli Desa | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| Alokasi Dana Desa | 575.086 | 575.086 | 604.975 | 604.975 | 626.079 | 626.079 |
| Dana Desa | 826.669 | 826.669 | 918.920 | 918.920 | 1.094.395 | 1.094.395 |
| Bagi Hasil Pajak | 10.530 | 10.530 | 25.591 | 25.591 | 37.633 | 37.633 |
| Bantuan Keuangan Khusus | 100.000 | 100.000 | 355.000 | 355.000 | 611.665 | 611.665 |

*(Dalam Ribuan 000)*

* + 1. Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Serapan atau realisasi belanja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah kami sampaikan pada tahun – tahun kemarin. Target dan realisasi belanja APBDesa Wonokerto Tahun Anggaran 2015 s.d 2019, sebagaimana tabel berikut :

Target dan Realisasi Belanja Desa Wonokerto TA 2015 s.d TA 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESA WONOKERTO**  **TAHUN** |  | |
| **Target** | **Realisasi** |
| Tahun 2015 | 946.005.268 | 934.500.268 |
| Tahun 2016 | 1.481.116.742 | 1.421.166.742 |
| Tahun 2017 | 1.688.992.929 | 1.666.433.068 |
| Tahun 2018 | 2.058.540.290 | 2.020.329.700 |
| Tahun 2019 | 2.480.805.227 | 2.480.805.227 |

* + 1. Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

* 1. **Program dan Kegiatan Indikatif**

**BAB VI**

**PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonokerto Kec. Gucialit Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan dalam masa pemerintahan Kepala Desa terpilih H. Tupin. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa periode 2021 – 2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dan RPJM Nasional.

RPJMDes Desa Wonokerto tahun 2021 – 2026 juga memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum dan program Perangkat Desa dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di Desa Wonokerto dalam 6 (enam) tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala Desa terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan secara terperinci.

* 1. **Kaidah Transisi**

RPJMDes Desa Wonokerto Kec. Gucialit Tahun 2021 – 2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026, perlu disusun RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2027 – 2032 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPDes setelah RPJMDes berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

* + 1. RPJMDes ini menjadi pedoman penyusunan RKPDes dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBDes masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa pada periode berikutnya;
    2. RPJMDes pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMDes;
    3. RKPDes masa transisi merupakan tahun pertama RPJMDes dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMDes periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMDes yang baru.
  1. **Kaidah Pelaksanaan**

RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Wonokerto serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMDes sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

* + - 1. Kepala Desa Wonokerto berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 - 2026 kepada masyarakat;
      2. Penyusunan RKPDes Desa Wonokerto Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026;
      3. Penyusunan RKPDes Desa Wonokerto dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
      4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APBDes Desa Wonokerto, ketentuan dan pelaksanaannya mengikuti pedoman / Juklak / juknis dari sumber dananya.;
      5. Masyarakat dapat berperanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMDes Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa apabila dianggap tidak sesuai dengaan yang ditetapkan.

Dokumen RPJMDes ini memerlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab, serta semangat gotong royong seluruh Masyarakat di Desa Wonokerto, sesuai dengan peran masing – masing dan juga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Desa Wonokerto Tahun 2021 – 2026 yaitu “ Terwujudnya Desa Wonokerto Yang Semakin Maju, Aman, Tenteram, Sejahtera Dan Bermartabat ”

KEPALA DESA WONOKERTO

**H. T U P I N**

NIP.19750301 200906 1 001